

KEDUDUKAN HUKUM WANITA JEPANG  
DI LINGKUNGAN PEKERJAAN SETELAH PERANG DUNIA II

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai  
salah satu persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Sastra

Oleh:

NOVI PURWATI

NIM : 01110013



PESTAKAAN BY DARMA PERSADA

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| No. Simbul    | : 075/FD/106-07    |
| No. Klas      | : 30564.0852 PER-K |
| Subjek        | : WANITA-JEPANG    |
| Sal           | : PHS              |
| dan lain-lain | :                  |

PROGRAM STUDI BAHASA DAN SAstra JEPANG  
FAKULTAS SAstra  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
JAKARTA  
2006

**Halaman Pengesahan**

Skripsi Sarjana yang berjudul:

**KEDUDUKAN HUKUM WANITA JEPANG  
DI LINGKUNGAN PEKERJAAN SETELAH PERANG DUNIA II**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Jepang

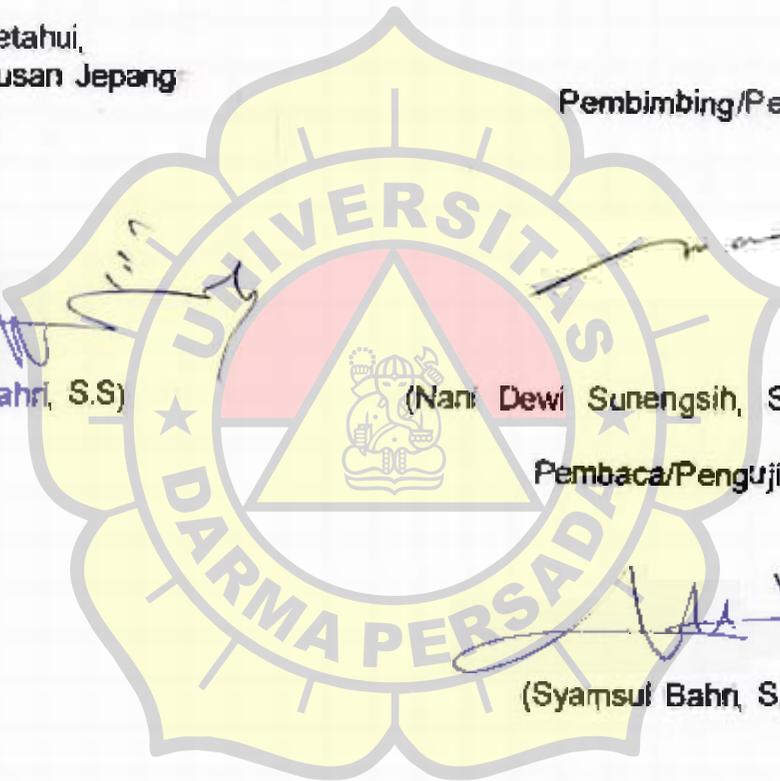
Pembimbing/Penguji

(Syamsul Bahri, S.S)

(Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd)

Pembaca/Penguji

(Syamsul Bahri, S.S)



**Halaman Pengesahan**

Skripsi yang berjudul :

**KEDUDUKAN HUKUM WANITA JEPANG  
DI LINGKUNGAN PEKERJAAN SETELAH PERANG DUNIA II**

Sekretaris/Penguji



(Oke Diah Arini, S.S)

Pembimbing/Penguji



(Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.P.d)

Ketua Sidang/Penguji



(Dra. Tini Priantini)

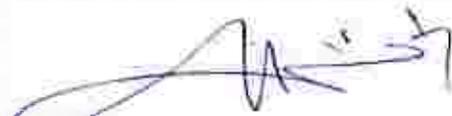
Pembaca/Penguji



(Syamsul Bahri, S.S)

Disahkan Oleh

Ketua Jurusan Jepang



(Syamsul Bahri, S.S)

Dekan Fakultas Sastra



FAKULTAS SASTRA

(Dr. Hj. Albertine S. Minderop, MA)

**Halaman Pernyataan**

Skripsi yang berjudul :

**KEDUDUKAN HUKUM WANITA JEPANG  
DI LINGKUNGAN PEKERJAAN SETELAH PERANG DUNIA II**

Merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd bukan merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006

Novi Purwati

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sidang Sarjana Strata Satu di Fakultas Sastra Universitas Darma Persada

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nani Dewi Sunengsih, S.S, MPd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terwujud.
2. Bapak Syamsil Bahri.SS, selaku pembaca dan selaku Ketua Jurusan Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Tiri Priantini, selaku Ketua Sidang Skripsi.
4. Ibu Oke Diah Arini SS, selaku Sekretaris Sidang Skripsi.
5. Orang tua tercinta yang telah membiayai dan memberikan kepercayaannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan dosen pengajar Program Studi Bahasa Dan Sastra Jepang Universitas Darma Persada

7. Adikku Dinda dan sepupu-sepupuku yang telah memberikan dukungannya
8. Syah Romi, yang telah membantu dan memberikan perhatian serta kasih sayangnya selama ini kepada penulis.
9. Semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya penulis sendiri sebagai mahasiswa Universitas Darma Persada.

Jakarta, 1 Agustus 2006

(Novi Purvati)

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN   |     |
| HALAMAN PERNYATAAN   |     |
| KATA PENGANTAR .....   | i   |
| DAFTAR ISI .....   | iii |
| ABSTRAKSI .....  | v   |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>   |     |
| A. Latar belakang masalah .....  | 1   |
| B. Permasalahan .....  | 5   |
| C. Tujuan penelitian .....   | 6   |
| D. Ruang lingkup penelitian .....  | 6   |
| E. Metodologi penelitian .....   | 6   |
| F. Sistematika penulisan .....   | 6   |
| <b>BAB II : STATUS DAN PERANAN WANITA JEPANG</b>   |     |
| A. Wanita Jepang pada jaman Meiji .....  | 8   |
| 1. Kedudukan hukum wanita Jepang .....   | 8   |
| 2. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan wanita .....  | 9   |
| B. Wanita Jepang setelah Perang Dunia II .....   | 18  |
| 1. Status wanita dalam masyarakat Jepang .....   | 18  |
| 2. Kebudayaan keluarga Jepang .....  | 18  |
| 3. Wanita bekerja .....  | 19  |
| <b>BAB III: KEDUDUKAN HUKUM WANITA JEPANG DILINGKUNGAN<br/>PEKERJAAN SETELAH PERANG DUNIA II</b> |     |
| A. Peran serta wanita Jepang dalam tenaga kerja .....  | 25  |
| B. Peresmian undang-undang perburuhan .....  | 28  |

|   |    |
|---|----|
| C. Kedudukan dan kondisi kerja kaum wanita..... | 33 |
| D. Keadaan di lingkungan usaha keluarga .....   | 50 |

BAB IV: KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## ABSTRAK

NOVI PURWATI. KEDUDUKAN HUKUM WANITA JEPANG DI LINGKUNGAN PEKERJAAN SETELAH PERANG DUNIA II. Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Darma Persada. Jakarta, 1 Agustus 2006.

Status wanita Jepang sebelum jaman Meiji dapat dikatakan terdapat diskriminasi antara pria dan wanita. Diskriminasi tersebut disebabkan oleh terlalu ketatnya pranata-pranata dan aturan-aturan yang bersifat hirarkis, struktur kelas sosial yang ketat dan struktur politik. Status wanita mulai ada kemajuan ketika memasuki jaman Meiji dimana pemerintah Meiji mengadakan restrukturisasi dalam kehidupan masyarakat, ada saat itu pemerintah memberikan kebijaksanaan pada pendidikan wanita. Adapun tujuan dalam kebijakan itu adalah agar wanita Jepang menjadi istri yang baik dan ibu yang bijaksana. Tidak ada pendapat umum yang menyatakan bahwa wanita harus dilatih dalam pendidikan-pendidikan akademis atau pengetahuan mengenai kehidupan di luar rumah. Status wanita Jepang dalam masyarakat baru mengalami perbaikan yang luar biasa setelah Perang Dunia I ketika undang-undang dasar yang disahkan pada tahun 1947 menyatakan bahwa semua orang sama dihadapan hukum. Mulai saat itu diskriminasi dalam segala bidang dihapuskan.

Pembimbing Materi

(Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jepang yang dikenal sekarang sebagai negara maju dan berteknologi tinggi tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi membutuhkan waktu yang panjang, perjuangan, dan kemauan yang keras. Jepang mulai bergerak maju dari keteringgalannya akibat perang saudara yang berkepanjangan dan penutupan negaranya selama 250 tahun lebih yaitu sejak masa Meiji tahun 1868.

Masa Meiji (1868-1912) merupakan salah satu periode yang paling istimewa dalam sejarah bangsa Jepang. Dibawah pimpinan Kaisar Meiji, Jepang mencapai pembentukan suatu bangsa yang modern yang memiliki perindustrian modern, lembaga-lembaga politik modern dan pola masyarakat yang modern<sup>1</sup>.

Kemajuan Jepang ini makin diperkuat setelah Perang Dunia II dimana terjadi proses demokratisasi yang mengubah semua aspek kehidupan keluarga Jepang.

Secara khusus dengan adanya revisi kitab undang-undang perdata memberikan kedudukan wanita dan pria sama dalam hukum.

---

<sup>1</sup> Michio Nagai, *Pergulatan Jepang dalam Modernisasi Pendidikan*, Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Yayasan Karti Sarana, Jakarta, 1993, h.185

Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga mempunyai dampak besar pada kehidupan keluarga. Salah satunya dari perubahan yang paling mencolok adalah peningkatan jumlah orang yang hidup dalam keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, hal ini merupakan suatu kecendrungan yang diperkuat oleh urbanisasi dan perkembangan teknologi.

Perubahan lainnya terlihat pada gaya hidup orang Jepang. Gaya hidup orang Jepang sangat berubah karena penggunaan perabotan rumah tangga modern secara luas, perluasan industri-industri makanan instan dan beku, tersedianya pakaian siap pakai dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kemudahan tersebut memberikan keluarga lebih banyak waktu untuk rekreasi dan menekuni pendidikan dan kebudayaan, khususnya bagi wanita yang berkeluarga yang tadinya terikat pada tugas rumah tangga.

Karena pekerjaan rumah tangga tidak memerlukan banyak waktu lagi, maka sejak itu ibu-ibu rumah tangga mempunyai lebih banyak waktu luang, banyak ibu rumah tangga yang mencari pekerjaan, diluar rumah mengikuti kursus dipusat-pusat masyarakat di universitas, atau berperan serta dengan kegiatan suka rela.

Pada awalnya, tepatnya sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Dasar yang diundangkan pada tahun 1946 yang menjelaskan tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria, kehidupan wanita hanya seputar

kehidupan rumah tangga saja tanpa adanya kebebasan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Namun setelah adanya undang-undang tersebut kedudukan wanita Jepang menjadi lebih baik, meskipun tidak berarti bahwa diskriminasi terhadap wanita tidak ada lagi.

Demikian pula pada bidang pendidikan, walaupun pemerintah telah banyak melakukan perubahan sistem pendidikan baik itu perbaikan programnya maupun pendidikan perluasan sekolah, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam memantapkan pendidikan bagi wanita. Pada waktu itu pemerintah berpegang pada hukum yang mengatur kekuasaan dalam keluarga, masyarakat dan negara yaitu hukum perdata Meiji (*Meiji Mimpo*) yang dikeluarkan pada tahun 1898.

*Meiji Mimpo* adalah perangkat yang mengatur hubungan dalam masyarakat, berupa hukum kekerabatan dan hukum pewarisan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 14 yaitu Istri memerlukan ijin suami untuk bertindak. Di dalam *Meiji Mimpo* ditetapkan bahwa prioritas dalam keluarga hanya dimiliki oleh seorang pria. Peraturan ini ditetapkan sesuai dengan tradisi kebudayaan Jepang yaitu wanita sebelum menikah harus takut pada ayahnya, setelah menikah harus setia dan mengabdikan kepada suaminya, sedangkan pada hari tuanya wanita mengabdikan kepada anaknya<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Masu Okamura, *Peranan Wanita Jepang*, Gadjah Mada University Press, Yayasan Obor Indonesia, 1979h29

Pada bidang pendidikan untuk wanita pemerintah menjalankan *Ryosai Kenbo* yang tujuannya agar wanita Jepang menjadi ibu yang baik dan bijaksana, sedangkan yang dibutuhkan dalam perkembangan jaman adalah agar wanita nantinya menjadi istri serta ibu yang bijaksana dalam arti dan wawasan yang luas, yaitu wanita yang dapat berdiri dengan kokoh baik di dalam kehidupan di rumah tangga misalnya dalam tata cara mendidik anak mengatur rumah tangga, hormat kepada suami serta kedudukannya di dalam masyarakat.

*Ryosai Kenbo* berasal dari kata *Ryosai* berarti istri yang baik dan *Kenbo* berarti ibu yang bijaksana. Makna *Ryosai Kenbo* mengandung 2 (dua) pengertian yaitu menuntut adanya suatu sistem pendidikan wanita yang mengarah pada keahlian pengetahuan serta keterampilan, sedangkan makna yang kedua, menuntut adanya kebajikan atau kepribadian yang bertanggung jawab atas keluarga. Kedua makna ini mendapat dukungan luas baik di kalangan masyarakat dan pemerintah serta wanita itu sendiri karena pada dasarnya *Ryosai Kenbo* dianggap sebagai pandangan hidup.

Pada tahun 1946 status wanita dalam masyarakat Jepang mengalami perbaikan dan tertuang pada pasal 14 undang-undang dasar yang menyatakan "Semua orang sama dihadapan hukum dan tidak boleh diadakan diskriminasi dalam hubungan politik, ekonomi atau sosial berdasarkan ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial atau

keturunan". Wanita Jepang yang bekerja diluar rumah pun mulai meningkat, dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan berbagai tindakan untuk memperbaiki keadaan wanita pekerja. Undang-Undang standar perburuhan tahun 1947 menandakan suatu langkah maju yang penting yaitu dengan mengajukan prinsip bayaran sama untuk pekerjaan sama. Walaupun demikian, banyak perusahaan masih terus melaksanakan kebijaksanaan penggajian berbeda antara pria dan wanita, dengan sistem berbeda untuk promosi dan kenaikan gaji. Kenyataannya wanita masih belum memperoleh persamaan yang sebenarnya<sup>3</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang kedudukan hukum wanita Jepang dilingkungan pekerjaan setelah Perang Dunia II

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status wanita dalam masyarakat Jepang sebelum Perang Dunia II?
2. Bagaimana kedudukan hukum wanita Jepang dilingkungan pekerjaan setelah Perang Dunia II?

<sup>3</sup> The International Society for Education Information, Inc. *Jepang Dewasa Ini*, Japan Echo Inc, 1989, h.81

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui:

1. Status wanita dalam masyarakat Jepang sebelum Perang Dunia II.
2. Kedudukan hukum wanita Jepang dilingkungan pekerjaan setelah Perang Dunia II.

### D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dibatasi pada pembahasan status wanita dalam masyarakat Jepang sebelum Perang Dunia II dan kedudukan hukum wanita Jepang dilingkungan pekerjaan setelah Perang Dunia II.

### E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan pembahasan bersifat deskriptif analisis.

### F. Sistematika Penulisan

Bab I pada bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini memaparkan tentang status dan peranan wanita dalam masyarakat Jepang sebelum dan sesudah Perang Dunia II.

**Bab III,** bab ini merupakan inti dari permasalahan yang membahas tentang kedudukan hukum wanita Jepang di lingkungan pekerjaan setelah Perang Dunia II.

**Bab IV,** Kesimpulan.

